

BAB V

MODEL ALTERNATIF IMPLEMENTASI PERENCANAAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

A. Rasional Pengembangan

Seperti telah dikemukakan dalam temuan penelitian, bahwa potensi wilayah kabupaten Subang sangat kaya akan sumber daya alam yang secara keseluruhan belum diberdayakan secara optimal. Ditinjau dari posisi antara wilayah kabupaten di Jawa Barat sangat ditunjang oleh infrastruktur transportasi yang sangat memadai. Persoalannya adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam, kaitannya dengan masalah penyelenggaraan pendidikan dasar dapat dijadikan suatu kondisi yang saling mendukung, baik pada kondisi jangka pendek maupun jangka panjang.

Namun demikian, telah kita sadari bahwa faktor Sumber Daya Alam belum menjadi jaminan apabila faktor-faktor yang paling terkait dengan keberhasilan pembangunan sesungguhnya adalah manusianya. Masyarakat yang ada baik sebagai individu, kelompok maupun yang ada dalam organisasi pemerintahan, sosial politik dan kemasyarakatan serta profesional sangat mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Oleh sebab itu, dalam upaya pembangunan pendidikan dasar di daerah diperlukan suatu upaya yang sinergis dan diperlukan kolektivitas komitmen, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan pendidikan, dan peduli terhadap daerahnya melalui aktivitas nyata termasuk terkondisinya masyarakat belajar.

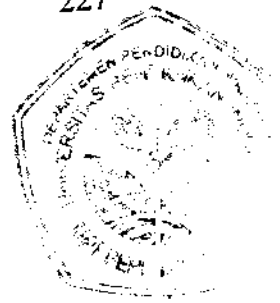
Ditilik dari kondisi yang telah dan sedang terjadi, terdapat faktor-faktor yang harus diperbaiki mulai dari: (1) pencerahan pengetahuan mengenai strategi kebijakan pada tingkat legislatif dan eksekutif berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SLTP) sebagai upaya pemenuhan Kebutuhan sesuai Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pasca otonomi daerah; (2) penataan sumber dan manajemen data karakteristik potensi wilayah sebagai bahan analisis lingkungan internal dan eksternal; (3) strategi pemecahan masalah empiris, sehingga dalam implementasi perencanaan dapat dielaborasi faktor determinan.

Bertolak dari kondisi tersebut, maka ketiga faktor yang dikemukakan merupakan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan dalam implementasi perencanaan strategi penyelenggaraan pendidikan dasar di kabupaten Subang.

B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Stratejik dan Kriteria Keberhasilan

Ketiga faktor yang diajukan sebagai alternatif perbaikan dalam implementasi perencanaan stratejik penyelenggaraan pendidikan dasar, yang dilandasi oleh asumsi strategi pembangunan saat ini menganut sistem dari bawah, maka peranan pemerintah perlu dititik beratkan pada aspek-aspek yang stratejik dan memberi peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya. Sistem yang kita anut dengan sendirinya adalah "sistem terbuka, yang lebih positif terhadap dinamika keadaan lingkungan sekitarnya". Oleh sebab itu, perlu dirumuskan berikut ini :

Visi	Terpenuhinya kebutuhan batas minimal pendidikan dasar (SD dan SLTP), terwujudnya masyarakat belajar yang dilandasi iman dan taqwa di kabupaten Subang.
Misi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Mencerdaskan masyarakat dalam peran serta pembangunan pendidikan (2) Menyiapkan sistem manajemen data informasi pendidikan terpercaya sebagai faktor penentu kebijakan (3) Mempersiapkan perencanaan pendidikan yang sinerjik (4) Terbuka dan tersedianya infrastruktur yang memadai bagi semua warga negara berusia Sekolah Dasar dan SLTP di kabupaten Subang.
Tujuan	Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar (SD-SLTP) secara optimal
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> (1) Anggota masyarakat terinstitusi seperti anggota DPRD, LSM dan persekolahan/madrasah, serta Birokrat pada pemerintah kabupaten Subang (2) Personil Kantor Dinas Pendidikan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta dinas yang relevan di kabupaten Subang
Program	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berbasis potensi wilayah
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> (1) Semua anggota masyarakat yang terlibat dalam pembangunan pendidikan, dapat berpartisipasi secara proporsional dan professional dalam pembangunan pendidikan (2) Semua anak-anak usia 7-12 tahun tertampung pada lembaga pendidikan di kabupaten Subang (3) Semua lulusan SD/MI dapat tertampung dan dapat menyelesaikan pendidikan SLTP/MTs atau sederajat di kabupaten Subang (4) Meningkatnya hasil perolehan pengetahuan dan keterampilan dasar melalui pendidikan di sekolah (5) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan



C. Stratejik

1. Pencerahan Pengetahuan Kebijakan Pendidikan Melalui Pelatihan

a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pencerahan pengetahuan strategi kebijakan pendidikan bagi para anggota legislatif, khususnya yang membidangi pendidikan dan anggaran, dan dinas yang diwakili oleh para perencana terkait pada masalah pendidikan (Bappeda) adalah untuk memberikan pemahaman konseptual masalah-masalah pendidikan di daerah.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan, melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan perguruan tinggi yang relevan dengan masalah pendidikan dasar dan menengah.

b. Pendekatan

Pendekatan pencerahan pengetahuan kebijakan pendidikan bagi anggota legislatif, LSM dan anggota organisasi terinstitusi lainnya yang dipandang efisien dan efektif adalah melalui pendekatan sistem moduler. Pendekatan ini mengacu pada pertimbangan belajar bagi orang dewasa, dengan mempertimbangkan waktu serta pendanaan.

Sistem moduler merupakan salah satu media belajar yang dapat memberikan berbagai informasi secara konseptual berkenaan dengan kebijakan pendidikan. Proses pembelajaran orang dewasa dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan warga belajar. Keterlibatan ego warga belajar adalah kunci keberhasilan pembelajaran orang dewasa. Untuk itu sumber belajar hendaknya mampu membantu warga belajar untuk (1) mengidentifikasi

kebutuhan, (2) merumuskan tujuan belajar, (3) ikut serta memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan penyusunan pengalaman belajar, (4) ikut serta dalam mengevaluasi kegiatan belajar.

Knowlles (1980) telah mengembangkan teori andragogi dan kemudian banyak memperoleh dukungan dari pakar lainnya. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan ego. Artinya keberhasilan dalam proses pembelajaran warga terletak pada mereka sendiri. Asumsi yang dijadikan landasan adalah bahwa (1) orang dewasa mempunyai konsep diri, (2) orang dewasa mempunyai akumulasi pengalaman, (3) orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar, (4) orang dewasa mempunyai pandangan untuk segera menerapkan perolehan belajarnya, (5) orang dewasa itu dapat belajar, (6) belajar merupakan proses terjadinya dalam diri orang dewasa, (7) perbedaan kondisi belajar memerlukan prinsip membelajarkan yang berbeda pula.

Kecenderungan orang dewasa belajar adalah pertama-tama dimulai dari dalam dirinya untuk melakukan proses kegiatan belajar. Ia memerlukan proses kegiatan belajar dengan penyesuaian tingkah lakunya dalam upaya untuk meningkatkan dirinya. Belajar bagi orang dewasa adalah perilaku mengembangkan diri melalui proses penyesuaian tingkah laku. Penyesuaian tingkah laku tersebut terwujud karena belajar, bukan karena akibat langsung dari kedewasaannya. Dapat dikemukakan bahwa belajar bagi orang dewasa sebagai proses adalah kegiatan orang dewasa yang dilakukan secara sengaja melalui penyesuaian tingkah laku untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Uraian tersebut, dapat diaplikasikan pada proses pembelajaran pihak-pihak yang dipandang terkait dengan masalah konsep kebijakan pendidikan.

c. Materi Pencerahan

Materi pencerahan bagi para anggota legislatif dan personil perencana di daerah dapat disusun berdasarkan kebutuhan. Sebagai ilustrasi materi pendidikan dan pelatihan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Konsep kebijakan pendidikan
- (2) Konsep administrasi pendidikan dalam konteks administrasi Negara
- (3) Konsep pemetaan dan penafisiran data kuantitatif pendekatan statistik
- (4) Konsep perencanaan stratejik pendidikan

Materi tersebut disajikan melalui modul, dan dilakukan tatap muka terbatas pada akhir pembahasan modul dengan fasilitator yang didatangkan dari Perguruan Tinggi. Hasil pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai masalah kebijakan pendidikan. Sehingga diperoleh kesamaan persepsi dalam menyikapi kebijakan pihak eksekutif baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.

2. Penataan Sumber dan Manajemen Data Karakteristik Potensi Wilayah

a. Penataan Sumber Data

Penataan data pendidikan menjadi persoalan krusial, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari masalah perangkat keras dan lunak sampai ke pada manusianya. Oleh sebab itu, salah satu alternatif digunakan sistem informasi berbasis teknologi. Hal ini dapat dikembangkan melalui sistem yang terpadu dan

dipandang murah apabila dapat dikendalikan secara tepat. Salah satu bentuk pemodelan sistem jaringan terpadu, yaitu adanya struktur dan aliran informasi sesuai dengan tingkatan, seperti pada lapisan bawah terdapat dua jenis yaitu : (1) personil operasi yang tugas utamanya berkaitan dengan menghasilkan produk atau jasa; (2) personil administrasi yang tugas utamanya menangani transaksi dan ikut serta menangani kegiatan administrasi organisasi.

Sebagian besar personil pada lapisan operasi memiliki tugas penyeliaan minimal atau bahkan mungkin tidak memiliki kewajiban pengambil keputusan, dan hanya terlibat dalam kegiatan sistem informasi organisasi. Sebagian besar personil operasi dalam kegiatannya memberikan input kepada sistem komputer atau proses atau menganalisis masing-masing transaksi, namun demikian umumnya tugas mereka tidak termasuk menganalisis output informasi. Secara umum personil operasi maupun administrasi terlibat dalam sistem informasi hanya terbatas. Pada lapisan pengambil keputusan pertama, aktivitas utamanya adalah penyeliaan personil operasi. Ini memerlukan interaksi intensif dengan personil bawahnya tentang kegiatan operasi atau menyelesaikan masalah personil. Sedangkan pengambil keputusan madya mempunyai dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan teknis dan profesional atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seorang spesialis. Sedangkan pada pengambil keputusan puncak merupakan pengambil kebijakan jalannya pembangunan pendidikan.

Transaksi yang berasal dari kegiatan administrasi operasi adalah penggerak sistem yang memberikan informasi bagi lapis manajemen terbawah. Pada lapis tengah organisasi ada dua kelompok utama personil manajemen menengah dan

spesialis atau profesional yang tidak berperan pengambil keputusan. Prinsip utama sistem informasi untuk spesialis adalah pemilihan teknologi bagi masing-masing kelompok. Informasi dipahami sebagai data dalam bentuk yang bermakna, informasi kuantitatif biasanya lebih mudah ditafsirkan tinimbang informasi naratif.

Pengambil keputusan puncak menggunakan sebagian besar waktunya untuk perencanaan, peninjauan seluruh kegiatan tas dasar ringkasan informasi, masalah khusus yang bersifat kritis bagi kehidupan organisasi, serta pelaksanaan kepemimpinan. Jenis keputusan yang dibuat berbeda untuk setiap lapisan pengambil keputusanial. Oleh sebab itu, kepentingan informasi sangat bervariasi mulai dari jenis, sumber dan perolehan informasi dalam suatu sistem terpadu.

Organisasi yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat dianalogiskan, tingkat operasional adalah sekolah dan dinas pendidikan kecamatan. Sedangkan tingkat stratejik berada pada dinas pendidikan kabupaten dan kota dan tingkat koordinasi berada di propinsi. Oleh sebab itu, yang harus menjadi prioritas pengembangan sistem informasi yang jalinanya terstruktur mesti dibangun oleh tingkat kabupaten dan kota yang terhubung dan terkoordinasi dengan persekolahan. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, selanjutnya kita melakukan suatu penataan sistem penjaringan dengan tahapan awal menyusun format jaringan data.

b. Pengembangan Model Pemetaan Berbasis Data Dasar

Instrumen data dasar ini merupakan suatu alat untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang terkait dengan kepentingan pembuatan Data Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Data Dasar ini merupakan suatu rekaman data/

informasi yang akan mendeskripsikan kondisi nyata tentang keberadaan (profil dasar). Melalui instrumen ini diharapkan terjaring berbagai data/informasi secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai bahan masukan dan kajian bagi pengembangan pendidikan, baik secara makro maupun mikro serta bagi kepentingan pembuatan/ penetapan suatu kebijakan. Format data yang diajukan sebagai model yang uniform dan digunakan sebagai alat penjaring, penyimpan dan sekaligus dapat diolah menjadi salah satu faktor penentu dalam menganalisis masalah pendidikan di kabupaten Subang.

Form data yang dikemukakan, selanjutnya direkayasa melalui form elektrik dan dijadikan basis data sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi dan terkoordinasi di kabupaten Subang. Sistem informasi manajemen pendidikan, sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak guna mempercepat pengambilan keputusan dengan tepat.

Pengembangan SIM Pendidikan tidak mungkin dilakukan oleh sebuah organisasi, akan tetapi perlu dibangun secara terpadu dan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang sistematis. Untuk lebih jelasnya tahapan tersebut meliputi :

- (1) Pembahasan Tujuan Pengembangan SIM
- (2) Pembentukan TIM Pengembang
- (3) Identifikasi tujuan dan sasaran informasi
- (4) Pemetaan informasi
- (5) Pemilihan model SIM
- (6) Penetapan kriteria mutu informasi
- (7) Pemilih perangkat lunak dan keras
- (8) Perhitungan biaya pengadaan
- (9) Estimasi pemeliharaan dan pembiayaannya
- (10) Estimasi nilai tambah dengan adanya SIM
- (11) Pemodelan
- (12) Aplikasi program
- (13) SIM Berjalan
- (14) Pemantauan

Keseluruhan pelayanan tersebut, selain dirancang berdasarkan kebutuhan data base dengan disain file terintegrasi juga dapat diakses dalam lingkungan pendidikan dengan model Local Area Net Working.

Apabila sistem telah dibangun sesuai dengan kebutuhan, maka dalam pemanfaatannya dapat digunakan sebagai alat dan sekaligus sebagai media penjaring data-data pendidikan. Data-data tersebut, dimulai dari berbagai hal seperti ditunjukkan pada lampiran.

Instrumen Data Dasar ini disusun dalam tiga format, yaitu:

Pertama, Form A Data Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, melalui form ini diharapkan dapat menjaring berbagai data/informasi yang terkait dengan peta manajemen di lingkungan internal dan eskternal organisasi.

Kedua, Form B Data Lembaga Pendidikan, melalui form ini diharapkan dapat menjaring berbagai data/informasi yang terkait dengan data-data identitas siswa, tenaga guru dan non guru, kurikulum, fasilitas PBM (ruang kelas, laboratorium, bengkel, peralatan PBM...) keuangan, dan hubungan masyarakat sekolah, idustri dan alumni).

Ketiga, Form C Data Individu, form ini merupakan form yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci tentang identitas individu, beserta hal-hal yang ada kaitannya dalam pelayanan pendidikan tingkat kelas antara lain akan mengungkap data individu siswa, data individu guru dan stap, data individu tenaga penunjang, dan data yang relevan dengan kebutuhan.

Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan/ Pernyataan tertutup sebagian lagi berupa pertanyaan/ pernyataan terbuka. Sesuai dengan petunjuk pada setiap butir nomor kode dan nomor sub kode maka jawabannya dapat dituliskan pada tempat yang telah disediakan dalam instrumen data dasar.

Petunjuk Khusus merupakan petunjuk teknis pengisian seluruh instrumen data dasar ini. Melalui petunjuk khusus ini diharapkan para pengisi instrumen akan dengan cepat memahami apa yang harus dilakukan. Tanda Petunjuk yang sering dijumpai dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tanda Kotak Kosong () diisi dengan tanda (X) pada pilihan/jawaban yang paling benar.

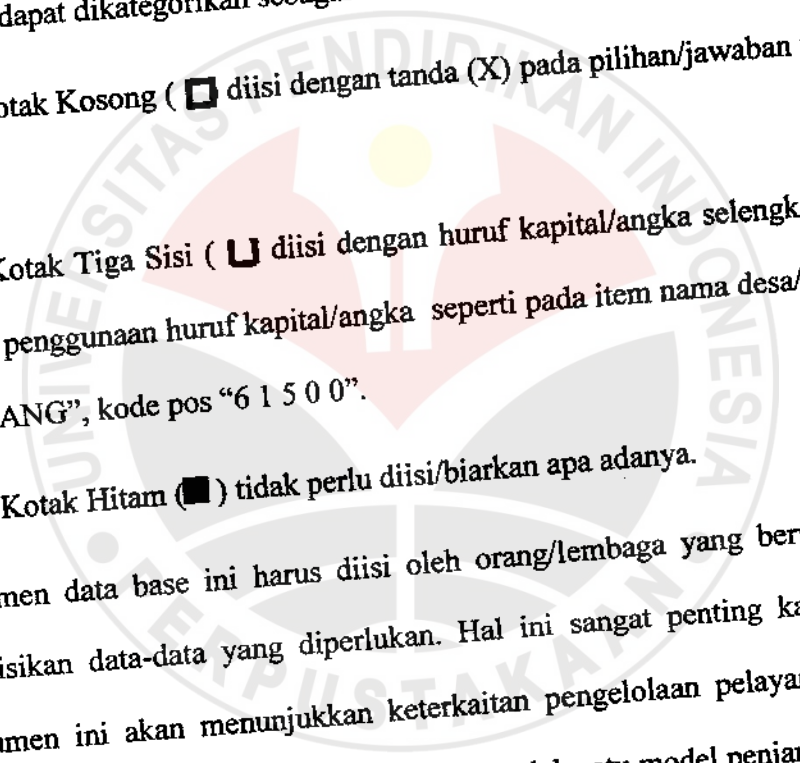
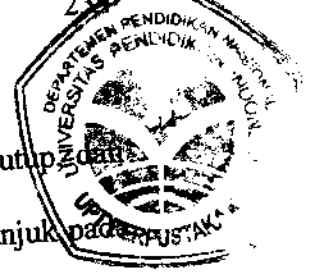
Tanda Kotak Tiga Sisi () diisi dengan huruf kapital/angka selengkap mungkin. Contoh penggunaan huruf kapital/angka seperti pada item nama desa/kelurahan ... "DIKBANG", kode pos "6 1 5 0 0".

Tanda Kotak Hitam () tidak perlu diisi/biarkan apa adanya.

Instrumen data base ini harus diisi oleh orang/ lembaga yang berwenang dalam mengisikan data-data yang diperlukan. Hal ini sangat penting karena substansi instrumen ini akan menunjukkan keterkaitan pengelolaan pelayanan pendidikan pada tingkat lembaga dan individu. Sebagai salah satu model penjaringan informasi awal dapat ditunjukkan pada matrik lampiran (Diadaftasi dari Kreator SIM, 1999).

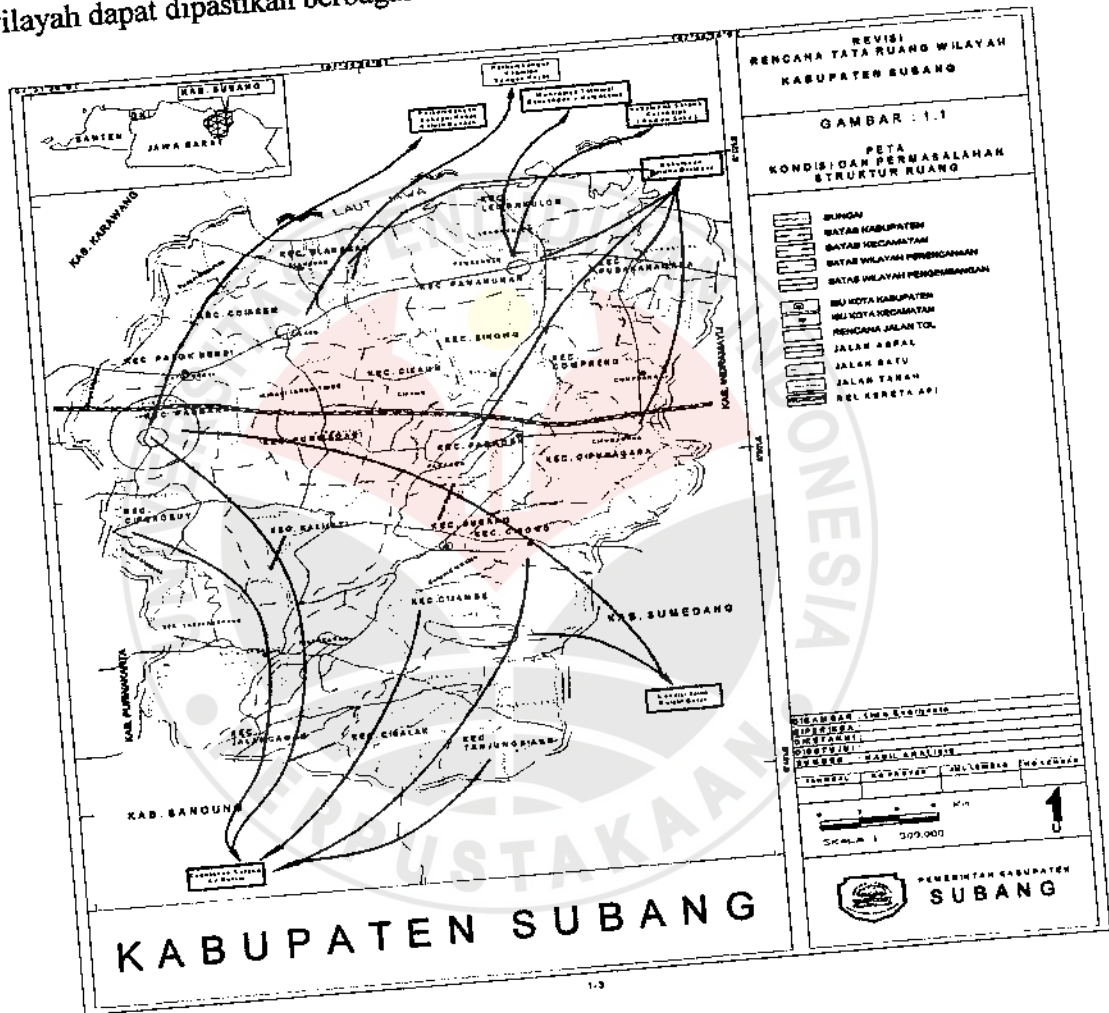
c. Model Analisis Faktor Lingkungan Berbasis Data

Model analisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Subang dapat dilakukan



berdasarkan pendekatan perhitungan statistik yang selanjutnya dideskripsikan menjadi narasi identifikasi masalah.

Perhitungan statistik tersebut, merupakan hasil pemanfaatan sumber data yang diperoleh melalui optimalisasi jaringan informasi terpadu yang bersifat dinamik. Informasi yang diolah berdasarkan peta wilayah terpadu sehingga setiap wilayah dapat dipastikan berbagai kebutuhan pelayanan pendidikan.

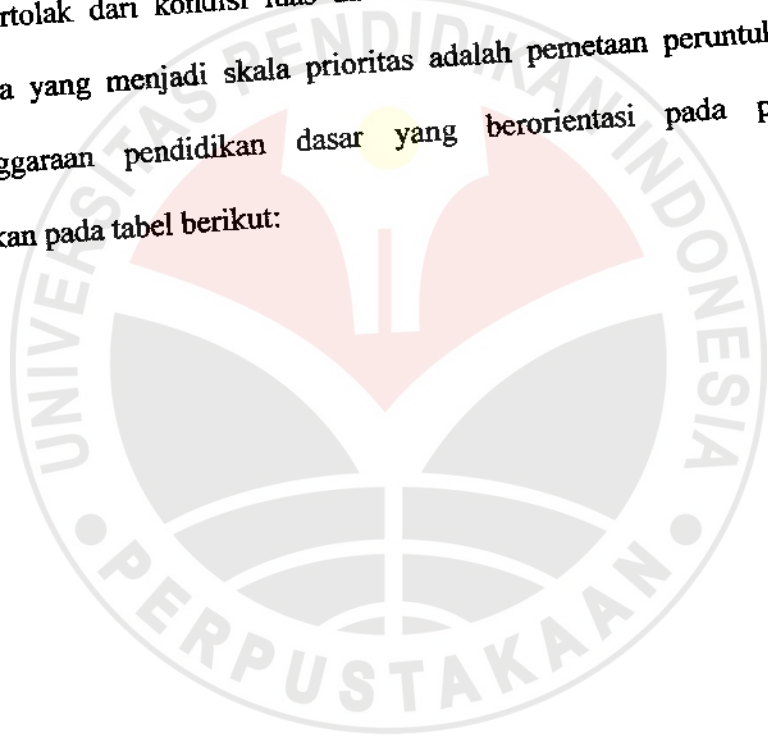


Gambar 5.1. Peta Masalah Pendidikan di Kabupaten Subang

Setiap wilayah dikaji berdasarkan faktor-faktor apa yang dipandang sebagai kebutuhan pelayanan dan permasalahan. Sistem informasi manajemen, dapat dioptimalisasikan dengan perangkat sistem pemetaan dan perhitungan secara terintegrasi. Model ini dipandang sangat memudahkan setiap pengambil keputusan untuk saling menelaah informasi dan dapat diaplikasikan pada perhitungan estimasi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di setiap wilayah kecamatan.

1) Kondisi Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Wilayah

Bertolak dari kondisi luas dan karakteristik wilayah kabupaten Subang, tampaknya yang menjadi skala prioritas adalah pemetaan peruntukan kekhasan penyelenggaraan pendidikan dasar yang berorientasi pada potensi dapat ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 5.1 Peta Permasalahan Sekolah Dasar Berbasis Data Secara Simultan

Wilayah	Kecamatan	Usia (7-12 th)	Jumlah yang bersekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Tak sekolah	Masalah	Estimasi pemecahan
Pegunungan	Sagalaherang	5.038	4.917	42	10	Bk	Brk
Pegunungan	Jalan Cagak	7.373	7.398	56	25	Ks	Pemetaan asal siswa
Pegunungan	Cisalak	5.796	5.315	39	18	Bk	Brk
Pegunungan	Tanjungsiang	4.395	4.134	30	26	Bk	Brk
Pegunungan	Cijambe	3.701	3.426	25	17	Bk	Brk
Dataran rendah	Cibogo	3.116	3.034	21	12	Or	Optimalisasi
Dataran rendah	Subang	13.434	13.403	85	31	Bk	Brk
Pegunungan	Kalijati	7.918	7.789	51	12	Bk	Brk
Dataran rendah	Cipendey	4.643	4.505	27	25	Md	Cek data base
Dataran rendah	Pabuaran	7.638	7.936	45	39	Bk	Brk
Dataran rendah	Patokbesi	8.607	8.216	42	35	Bk	Brk
Dataran rendah	Purwadadi	6.712	6.380	49	28	Md	Cek data base
Dataran rendah	Cikaum	5.053	4.268	29	32	Md	Cek data base
Dataran rendah	Pagaden	6.996	7.524	49	33	Bk	Brk
Dataran rendah	Cipunagara	6.229	6.130	32	11	Or	Optimalisasi
Pantai utara	Compreng	5.156	5.145	31	39	Md	Cek data base
Dataran rendah	Binong	8.135	8.674	48	39	Md	Cek data base
Pantai utara	Ciasem	11.657	12.048	65	49	Sm	Pembudayaan
Pantai utara	Pamanukan	9.063	8.481	54	21	Md	Cek data base
Pantai utara	Pusakanegara	7.486	9.201	48	25	Sm	Pembudayaan
Pantai utara	Legonkulon	4.589	2.335	15	10	Sm	Pembudayaan
Pantai utara	Blanakan	6.758	5.725	30	10	Sm	Pembudayaan

Sumber : Diolah dari Bappeda Kabupaten Subang 2003
 Keterangan : Bk = bangunan kurang; Ks = kelebihan siswa batas wajar; Or = optimalisasi ruang; Md = masalah data; Sm = sosial masyarakat
 Brk = bangun ruang kelas

Tabel 5.2 Peta Permasalahan Sekolah Dasar Berbasis Data Secara Simultan

Wilayah	Kecamatan	Usia (7-12 th)	Jumlah yang bersekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Masalah	Estimasi pemecahan
Pegunungan	Sagalaherang	5.038	4.917	42	162	Kg = 32	Gb
Pegunungan	Jalan Cagak	7.373	7.398	56	33	Kg = 57	Gb
Pegunungan	Cisalak	5.796	5.315	39	25	Kg = 14	Gb
Pegunungan	Tanjungsiang	4.395	4.134	30	130	Klg = 43	Gb
Pegunungan	Cijambe	3.701	3.426	25	136	Kg = 45	Gb
Dataran rendah	Cibogo	3.116	3.034	21	117	Kg = 11	Gb
Dataran rendah	Subang	13.434	13.403	85	117	Klg = 122	Penyebaran
Dataran rendah	Kalijati	7.918	7.789	51	148	Klg = 68	Penyebaran
Pegunungan	Cipendeuy	4.643	4.505	27	33	Kg = 41	Gb
Dataran rendah	Pabuaran	7.638	7.936	45	220	Kg = 78	Gb
Dataran rendah	Patokbesi	8.607	8.216	42	30	Kg = 74	Gb
Pantai utara	Purwadadi	6.712	6.380	49	30	Klg = 1	Penyebaran
Dataran rendah	Cikaum	5.053	4.268	29	171	Kg = 32	Gb
Dataran rendah	Pagaden	6.996	7.524	49	300	Kg = 43	Gb
Dataran rendah	Cipunagara	6.229	6.130	32	184	Kg = 90	Gb
Dataran rendah	Compreng	5.156	5.145	31	114	Kg = 69	Gb
Pantai utara	Binong	8.135	8.674	48	37	Kg = 66	Gb
Dataran rendah	Ciasem	11.657	12.048	65	28	Kg = 83	Gb
Pantai utara	Pamanukan	9.063	8.481	54	217	Kg = 107	Gb
Pantai utara	Pusakanegara	7.486	9.201	48	117	Kg = 119	Gb
Pantai utara	Legonkulon	4.589	2.335	15	67	Kg = 43	Gb
Pantai utara	Blanakan	6.758	5.725	30	131	Kg = 75	Gb

Sumber : Diolah dari Bappeda Kabupaten Subang 2003
 Keterangan : kg =kurang guru; Klg = kelebihan guru; Gb =mengangkat guru bantu

2) Analisis Substansi

Berdasarkan tabel 51 dan 52, tampak bahwa persoalan yang harus memperoleh perhatian adalah berkaitan dengan sarana, dan tenaga kependidikan. Dilihat dari inprastruktur sekolah sekitar sepuluh kecamatan mengalami kekurangan bangunan, dan hampir semua kecamatan mengalami kekurangan jumlah guru, dan terdapat tiga kecamatan yang harus dilakukan penataan penyebaran guru secara adil.

Persoalan yang ditemukan dikaitkan dengan pemerataan, tentunya masalah ruang belajar dan tenaga guru harus menjadi skala prioritas dalam pelayanan pendidikan dasar. Oleh sebab itu dipandang dari konsep manajemen pendidikan, maka seyogyanya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah perlu ditumbuh kembangkan di setiap kecamatan untuk memperoleh pemecahan masalah.

Demikian pula dilihat dari kualitas perolehan hasil belajaran hamper 70% peserta didik di kabupaten Subang masih memperoleh nilai ujian akhir < 60 . Peran guru melalui peningkatan profesionalisme masih menjadi kendala. Hal itu dikaitkan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelatihan bagi guru, masih belum memadai.

3. Pemecahan Masalah

Sebagai langkah pemecahan masalah diperlukan, strategi pemecahan masalah selaras dengan persoalan dan kemampuan potensi pemerintah, serta masyarakat. Salah satu strategi untuk menetapkan skala prioritas pembangunan pendidikan dasar, adalah melakukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi ke



orientasi pengembangan kecakapan dasar. Kondisi ini merupakan satu bentuk tawaran di kemudian hari sehingga menjadi unggulan dan dapat dijadikan suatu objek pemodelan. Sebagai gambaran secara simultan dapat ditunjukkan, bagaimana peta pemecahan masalah yang dilandasi oleh potensi wilayah.

Matrik : 5.3. Peta Orientasi Penyelenggaraan Pendidikan

Kecamatan	SD		SLTP		SLTA	
	JML	ORIENTASI DASAR KECAKAPAN	JML	ORIENTASI DASAR KECAKAPAN	JML	ORIENTASI DASAR KECAKAPAN
Sagalaherang	42	Pertanian	42	Pertanian	2	Pertanian
Jalan Cagak	56	Parawisata	56	Parawisata	2	Parawisata
Cisalak	39	Pertanian	39	Pertanian	2	Pertanian
Tanjungsang	30	Pertanian	30	Pertanian	2	Pertanian
Cijambe	25	Pertanian	25	Pertanian	2	Pertanian
Cibogo	21	Pertanian	21	Pertanian	2	Pertanian
Subang	84	Industri	84	Industri	2	Industri
Kalijati	51	Industri	51	Industri	2	Industri
Cipendeuy	27	Industri	27	Industri	2	Industri
Pabuaran	45	Industri	45	Industri	2	Pertanian
Patokbesi	42	Pertanian	42	Pertanian	2	Pertanian
Purwadadi	49	Pertanian	49	Pertanian	2	Pertanian
Cikaum	29	Pertanian	29	Pertanian	2	Pertanian
Pagaden	49	Pertanian	49	Pertanian	2	Pertanian
Cipunagara	32	Pertanian	32	Pertanian	2	Pertanian
Compreng	31	Pertanian	31	Pertanian	2	Pertanian
Binong	48	Pertanian	48	Pertanian	2	Kelautan
Ciasem	64	Kelautan	64	Kelautan	2	Kelautan
Pamanukan	51	Kelautan	51	Kelautan	2	Kelautan
Pusakanegara	48	Kelautan	48	Kelautan	2	Kelautan
Legonkulon	15	Kelautan	15	Kelautan	2	Kelautan
Blanakan	29	Kelautan	29	Kelautan	2	Kelautan

Penataan penyelenggaraan yang ditunjukkan pada tabel di atas, berdasarkan analisis faktor dominan dari kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada potensi wilayah.

Selanjutnya peta masalah tersebut diturunkan pada bagaimana upaya mencapai tujuan, kita rujuk pada aspek-aspek sumber daya seperti :

a. Bangunan sekolah

Bangunan sekolah terkait dengan pembiayaan pemerintah pusat dan kabupaten, sangat kurang maka dalam skala prioritas perlu dikembangkan bagaimana tumbuh budaya partisipasi masyarakat sekolah.

Pembangunan fisik dalam implementasi perencanaan strategik, perlu ada kepastian yang mengarah kepada bentuk stimulus agar tumbuh rasa memiliki dan memerlukan di pihak masyarakat. Sehingga beban pemerintah kabupaten, dapat dikurangi akan tetapi dimensi pelayanan tercapai.

b. Tenaga guru, staf TU

Tanaga guru, yang selama ini merupakan upaya sekolah melalui pengangkatan guru honorer bersifat tidak tetap, pemerintah pusat telah mencoba melakukan penetapan Guru Bantu yang bersifat kontrak. Tentunya perlu memperoleh perhatian dalam implementasi perencanaan, apakah Guru Bantu tersebut akan terus dilembagakan, dengan tidak memperhatikan kearah yang permanent seperti pengangkatan PNS. Tentunya dalam strategi perlu diestimasi secara tepat, agar tidak terjadi pemborosan, pembiayaan, waktu dan tenaga.

c. Kurikulum kewilayahan sebagai model pengembangan lokal

Kurikulum yang dikembangkan, sebagai salah satu wujud strategi pengembangan wilayah, tentunya perlu menjadi perhatian pihak perencana di tingkat kabupaten. Hal itu memungkinkan, apabila berpijak pada kewenangan pusat yang memberikan kepada daerah dalam rangka diverifikasi kurikulum bermuatan local.

d. Mutu proses dan hasil

Mutu proses dan hasil sangat ditentukan oleh peran guru, oleh sebab itu pemecahan masalah dengan kualitas guru perlu menjadi perhatian pihak daerah untuk mandiri melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang relevan dan terdekat.

e. Perbaikan tindak lanjut

Perbaikan keseluruhan program akan berhasil apabila telah dirancang secara sinerjik antara suatu kegiatan dengan kegiatan lain. Oleh sebab itu, dalam implementasi perencanaan strategik perlu dirumuskan bagaimana upaya perbaikan berkelanjutan dalam bidang pendidikan dasar terjadi.

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan, tampaknya sudah menjadi keharusan dalam implementasi perencanaan strategi pembangunan pendidikan dasar melalui berbagai pendekatan secara kholistik, sehingga pembangunan tidak bersifat parsial.

